

KEBIJAKAN PENGANGGARAN BERSIFAT MULTI-DIMENSI

- **Ekonomi:** Penganggaran (*budgeting*) harus memperhitungkan kaidah ekonomi makro dan ekonomi mikro
- **Politik:** Proses penganggaran memerlukan pemahaman tentang interaksi antar aktor kebijakan dengan tujuan-tujuan yg bersifat politis
- **Administrasi:** Pendapatan dan belanja negara harus dikelola dengan pemahaman yang baik tentang administrasi perpajakan dan fokus belanja publik yang produktif dan efisien.

VARIABEL FISKAL DALAM SISTEM EKONOMI TERBUKA

$$Y = S + I + G + (X - M)$$

$$G = Tx - T$$

Y : pendapatan nasional (PDB)

S : tabungan masyarakat

I : tingkat investasi

X : ekspor

M : impor

Tx : pajak

G : pengeluaran pemerintah

T : transfer (subsidi) pemerintah

LOGIKA UMUM KEBIJAKAN FISKAL

•☞ Tujuan kebijakan fiskal:

1. Pertumbuhan ekonomi yang layak
2. Mengurangi pengangguran
3. Menstabilkan harga

•☞ Selalu akan terdapat konflik antara stabilitas harga dan kesempatan kerja: Usaha menstabilkan harga akan berakibat pada pengurangan kesempatan kerja. Sebaliknya pengurangan pengangguran sering dibarengi peningkatan inflasi.

KEBIJAKAN FISKAL ADALAH KEPUTUSAN POLITIK

- Tujuan politik seringkali bersifat dominan dalam kebijakan fiskal. Misal: mengurangi ketergantungan pada modal asing, perlindungan industri: baja, otomotif, dirgantara, dsb
- Pergeseran tujuan jangka pendek, menengah, panjang. Misal: stabilisasi harga, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan perkapita.
- Efektivitas kebijakan tergantung konteks politik. Rejim menentukan *policy compliance*, kekuatan teknokrat, dsb.
- Dalam praktik ketata-negaraan, kebijakan fiskal merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR.

PENDEKATAN EKONOMI-POLITIK (MITCHEL, 1968)

- **Ekonomi:** Untuk apa sumberdaya produktif digunakan? Apa yang diproduksi? Berapa?
- **Ekonomi-politik:** Komposisi anggaran publik. Barang apa yang harus diproduksi? Berapa?
 - **Ekonomi:** Bagaimana barang diproduksi? Masalah organisasi ekonomi dari proses produksi.
- **Ekonomi-politik:** Bagaimana pilihan-pilihan kebijakan ttg anggaran dibuat?
 - **Ekonomi:** Bagaimana barang didistribusikan? Masalah distribusi pendapatan.
- **Ekonomi-politik:** Siapa, mendapatkan apa, seberapa banyak, dari distribusi barang yang diproduksi secara nasional.

ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK (MIKESELL,1995:407)

1. Penyusunan prakiraan ekonomi
 - Pembuatan model ekonomi nasional dan regional
 - Membuat asumsi faktor external
2. Prediksi basis penerimaan (base revenue);
 - Menghubungkan kegiatan ekonomi dengan basis penerimaan pemerintah
3. Estimasi potensi pajak (tax liability);
 - Menghitung besaran penerimaan pajak sesuai dengan potensinya
4. Estimasi waktu penerimaan pajak;
 - Menyesuaikan penerimaan pajak dalam tahun fiskal dan menyesuaikan dengan struktur perpajakan nasional.

KEBIJAKAN UMUM PERPAJAKAN (RPJM 2004-2009)

1. Fokus kebijakan: PPh Non-migas, PPN, PBB
2. Penambahan jumlah wajib pajak patuh (estimasi: 250 per tahun)
3. Peningkatan efektivitas penagihan tunggakan pajak
4. Menambah jumlah WP (target: 60,000 per tahun)
5. Menjaring WP besar (sekitar 100) dan penambahan kantor untuk WP menengah dan kecil.

DILEMA PAJAK VS. SUBSIDI

1. Efek kebijakan berjangka panjang dan sulit diprediksi.

Contoh:

- Kenaikan PTKP tahun fiskal 2005 (dari Rp 2,88 juta ke Rp 12 juta): Ada “potential loss”, tetapi akan berdampak meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi
- Penghapusan PPnBM (PP No.55/2004): menurunkan penerimaan pajak tetapi menurunkan harga barang & mengurangi penyelundupan (?)

2. Penyaluran subsidi sering kurang efektif.

Contoh:

- Kompensasi BBM (Rp 7,3 triliun) melalui Depkes, Diknas, Bulog; Apakah Raskin, fasilitas kesehatan dan pendidikan sampai sasaran?
- Kompensasi BBM melalui DPU (Rp 3,4 triliun) di 11.000 desa tertinggal; Apakah proyek yang dibangun (jalan, saluran irigasi) bisa membantu rakyat miskin?

STRUKTUR PAJAK YANG BAIK

1. Perolehan (*yield*) harus memadai
2. Distribusi beban pajak (*tax burden*) harus adil
3. Beban akhir pajak harus jelas
4. Tidak menghasilkan beban lebih (*excess burdens*)
5. Menunjang upaya stabilisasi dan pertumbuhan
6. Adil dan mudah secara administratif
7. Biaya administrasi dan penegakan aturan (*compliance*) tidak boleh terlalu tinggi.